

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI PERIODE TAHUN 2019 – 2021

**NASKAH PUBLIKASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan  
Pada Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi  
Manajemen

**SLAMET RIYADI**  
**NIM : C0120036**

Pembimbing 1 : Drs. Suyamto, M.M

Pembimbing 2 : Drs. Darsono, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS**  
**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA**

**2023**



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**PERNYATAAN PENULISAN**

**Judul : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2019 – 2021**

**NAMA : SLAMET RIYADI  
NIM : C0120036**

1. Saya menyatakan dan bertanggung jawab sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya sendiri. Jika suatu saat ada pihak yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai bukti yang cukup, maka saya bersedia membatalkan gelar saya beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian ini diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta bersama dengan dosen pembimbing.

Surakarta, 12 Juni.....2023



**SLAMET RIYADI**



**UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**LEMBAR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI**

**Judul :** Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2019 – 2021

**NAMA :** SLAMET RIYADI  
**NIM :** C0120036

Naskah publikasi ini telah memenuhi syarat sebagai artikel ilmiah dan dapat diajukan dalam jurnal ilmiah, berdasarkan atas hasil karya/ ilmiah/penelitian yang telah peneliti lakukan

Surakarta, 12 Juni ..... 2023

Disetujui dan diterima baik  
untuk dipertahankan

Pembimbing II

(Drs. Darsono, M.Si)  
NIDN : 0604036401

Pembimbing I

(Drs. Suyanto, M.M)  
NIDN : 0011025810



UNIVERSITAS TUNAS PEMBANGUNAN SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

**Judul :** Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Periode Tahun 2019 – 2021

**NAMA :** SLAMET RIYADI

**NIM :** C0120036

Naskah publikasi ini telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal: 23 Juni 2023

Ketua Penguji : Drs.Laksono Sumarto, MM

Sekretaris : Zandra Dwanita Widodo, S.Pd, SE, MM

Anggota : Drs. Suyamto, MM

**Mengetahui,**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dra. Sriwijastuti, M.M)

Ketua Program Studi Manajemen

(Abdulah Zailani, SE, SAg, M.M, M.Si)

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI PERIODE TAHUN 2019 - 2021

Slamet Riyadi, Suyamto, Suharyoko  
Program Studi Manajemen, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta  
Jl. Walanda Maramis No. 31 Surakarta  
e-mail: msmedoels8@gmail.com

**ABSTRAKSI:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten Wonogiri.

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. variabel-variabel yang diteliti adalah:-RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) -APBD (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan daerah pada badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019-2021 sudah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan namun telah memenuhi kriteria efektif. Kemudian dilihat dari tingkat efisiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 dinilai kurang efisien.

Kata kunci: efektivitas, efisiensi, Anggaran/ Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

**ABSTRACT:** This study aims to determine the level of effectiveness and efficiency of the use of regional revenue and expenditure budgets at the Wonogiri district financial management agency.

The object of this research is the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Wonogiri District. The reason for choosing this location is because it is the author's hometown, making it easier for the author to obtain the data needed during the research process. the variables studied are: -RAPBD (Regional Revenue and Expenditure Budget Plan) -APBD (Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget for the Period of 2019 to 2021).

The results of the study concluded that the level of effectiveness of regional income at the Wonogiri District regional financial management agency for the 2019-2021 budget year had reached the budget target that had been set but had met the effective criteria. Then, judging from the level of efficiency of regional spending at the Wonogiri District regional financial management agency for the 2019 to 2021 budget years, it is considered less efficient.

Keywords: effectiveness, efficiency, Budget/ Realization of Income and Expenditure.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

## TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### ➤ Tinjauan Pustaka

#### 1. Manajemen Keuangan

a. Pengertian Manajemen Keuangan  
Manajemen Keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

b. Fungsi Manajemen Keuangan  
Secara umum kegiatan utama atau fungsi keuangan terbagi dua kelompok yaitu:

- 1) Kegiatan mencari dana
  - 2) Kegiatan menggunakan dana
- Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya keputusan yang harus diambil dan berbagai aktivitas yang harus dilakukan oleh manajer keuangan.

Jadi, fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu:

1) Keputusan Investasi  
Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam *allocation of fund* atau pengalokasian dana kedalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara *current assets* dengan *fixed asset*.

2) Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah merupakan keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan, dengan melihat baik jangka pendek atau jangka panjang maka perbandingan yang terjadi disebut dengan struktur finansial. Dan jika yang diperhatikan adalah hanya dana investasi dalam jangka panjang saja maka perbandingannya disebut struktur modal. Dalam keputusan pendanaan mempengaruhi baik struktur modal maupun struktur finansial.

#### 3) Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah merupakan keputusan manajemen keuangan dalam menentukan dalam besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan.

#### 2. Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang

harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Mahsun (2013: 25) mengatakan bahwa: "Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan"

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2018: 40).

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah adalah aparatur yang bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan (Halim, 2014: 67). Salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio ketergantungan. Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2019 : 226):

- a. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### 3. Anggaran

#### a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, Mardiasmo (2018: 61). Sedangkan menurut Wiratno (2016: 28) anggaran adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat secara tepat dan cermat berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu satu periode (Erna wijaya: 2015). Anggaran yang telah disusun akan digunakan oleh pihak manajemen untuk mengarahkan jalannya kondisi organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan baik dan lancar. Mardiasmo (2018:98) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara

pada masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan diterima dalam masa tersebut.

Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2016:48). Sedangkan menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2016: 235) Anggaran merupakan suatu kinerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (Rupiah) selama masa periode tertentu (satu tahun). Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan rencana pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja sebagai alat memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua dari berbagai unit kinerja.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk Rupiah untuk merealisasikan rencana kerja suatu organisasi yang tersusun secara sistematis dalam suatu periode tertentu baik untuk membiayai pengeluaran serta membantu dalam pengambilan keputusan.

b. Fungsi dan Manfaat Anggaran

Anggaran dalam akuntansi berada di ruang lingkup akuntansi manajemen. Mardiasmo (2018: 70) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan

Mardiasmo (2018: 71) menyatakan bahwa anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan, digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternatif pembiayaannya;
- c. Mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun; dan
- d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*misappropriation*) atau adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran merupakan alat untuk mengawasi kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pengendalian anggaran sektor publik dapat dilakukan dengan empat cara yaitu:

- a) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan;



- b) Menghitung selisih anggaran (*favourable dan unfavorable variances*);
- c) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians;
- d) Merevisi standar biaya untuk target anggaran untuk tahun berikutnya.
- 3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal  
Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonom.
- 4) Anggaran sebagai alat politik  
Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik, sebagai bentuk komitmen eksklusif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu. Para manajer publik perlu pemahaman tentang manajemen keuangan sektor publik yang memadai serta anggaran tidak sekedar alat teknik melainkan diperlukannya keterampilan berpolitik (*political skill*), membangun koalisi dan keahlian bernegosiasi. Oleh karena itu, kegagalan dalam melaksanakan anggaran akan dapat menjatuhkan kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.
- 5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi  
Sebuah bagian unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya melalui dokumen anggaran yang komprehensif. Oleh karena itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.
- 6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja  
Pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian kinerja eksklusif. Tingkatan hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan merupakan penilaian kinerja manajemen publik. Anggaran merupakan alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
- 7) Anggaran sebagai alat motivasi  
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan maka alat yang dapat digunakan salah satunya adalah anggaran. Selain dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Hendaknya anggaran jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai, namun jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi.
- 8) Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik  
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup oleh publik. Elemen-elemen yang harus terlibat dalam penganggaran publik masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah, seperti LSM,

Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi masyarakat lainnya. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung di mana masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kerja pemerintah (daerah) sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

#### 4. Efektivitas

##### a. Definisi Efektivitas

Menurut Beni (2016: 69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika suatu kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Danumihardja (2014: 90) efektivitas ialah suatu ukuran yang mengungkapkan seberapa jauh (kuantitas, kualitas dan waktu) telah mampu dicapai. Jika digambarkan dalam bentuk persamaan maka efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan.

Menurut Mardiasmo (2018: 134) "Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya". Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan Mahmudi (2015: 86) menjelaskan bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Sedarmayanti (2015:59) menyatakan bahwa, "efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai". Menurut Makmur (2011:5) "Efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan". Untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada Negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan

Secara umum efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh perusahaan, yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

##### b. Pengukuran Efektivitas

Bastian (2006:77) menyatakan bahwa tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi berorientasi laba (swasta) maupun organisasi non profit (sektor publik) adalah *value for money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana penjelasan masing-masing elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengukuran Ekonomi

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang digunakan ekonomi berupa ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomi adalah:

- a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

2) Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

3) Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2018:132).

Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan lebih. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018; 134).

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1) Ketepatan Waktu

Keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi ditentukan oleh waktu. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Ketepatan Perhitungan Biaya

Tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dalam arti berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

3) Ketepatan Dalam Pengukuran

Gambaran daripada efektivitas yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi sebenarnya merupakan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur di antara yang baik dan jujur pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tapi melalui suatu proses.

5) Ketepatan Berpikir

Kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerja sama dalam memberikan hasil yang maksimal dibutuhkan ketepatan berfikir sehingga melahirkan pemikiran yang efektif.

6) Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan aktivitas suatu organisasi. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

#### 7) Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

#### 8) Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas oleh Makmur di atas intinya dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan ukuran-ukuran ketepatan efektivitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard (2015: 221) yang meliputi:

#### 1) Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan menyesuaikan terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerja sama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerja sama dalam mencapai tujuan. Setiap orang yang masuk kedalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja dalam organisasi tersebut.

#### 2) Prestasi Kerja

Prestasi Kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

#### 3) Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seorang atas peranan atau pekerjaan dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

#### 4) Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis

produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5) Penilaian Oleh Pihak Lain

Penilaian mengenai organisasi dan unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi itu berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum.

### 5. Efisiensi

Menurut Mahmudi (2015: 143) efisiensi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Sedangkan Winarno (2016: 178) menyatakan bahwa, efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (*output*) barang dan jasa dengan masukan (*input*) yang langka dalam suatu unit kerja atau ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya).

Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Sedarmayanti (2017: 22) efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, efisiensi merupakan keberhasilan yang dinilai berdasarkan perbandingan antara faktor *output* (keluaran) dan faktor *input* (masukan). Suatu unit kegiatan ekonomi dikatakan efisien secara teknis apabila menghasilkan output maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah

tertentu *output* menggunakan sumber daya yang minimal.

### 6. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran daftar pustaka, diketahui bahwa penelitian terkait objek efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja, telah banyak diteliti oleh mahasiswa yang relevan untuk dibandingkan dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya disajikan di bawah ini:

- a. Penelitian oleh Prasetyo et al., (2020). Yang berjudul "Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang bervariasi. Presentase tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2019 sebesar 93% dengan kategori efektif. Tingkat efektivitas terendah di tahun 2017 dengan presentase 76,91% (kurang efektif). Untuk tingkat efisiensi penyerapan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang periode 2015 – 2019 secara keseluruhan tidak efisien. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran maka diperlukan koordinasi dan kerjasama antara pihak – pihak yang berkepentingan.
- b. Penelitian Sunanto (2017). Meneliti tentang: "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin" Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin atas penerimaan PAD sudah efisien, hanya saja ditinjau dari sudut efektivitas kinerja APBD tidak efektif, karena realisasi yang

didapatkan tidak bisa melebihi anggaran yang ditentukan.

- c. Penelitian Manimbaga et al., (2021). Yang berjudul: "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan daerah untuk tingkat efektivitas pada Pemerintah Kota Bitung selama periode tahun anggaran 2014-2018 terbagi atas dua kriteria yaitu efektif untuk tahun 2014 dan 2017, sedangkan cukup efektif pada tahun 2015, 2016, dan 2018. Sedangkan kinerja keuangan daerah untuk tingkat efisiensi pada Pemerintah Kota Bitung untuk tahun 2014-2018 pada umumnya sudah masuk kriteria efisien hanya pada tahun 2015 dan 2018 tergolong tidak efisien.
- d. Penelitian dari Syahputra et al., (2021) yang berjudul: "Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa". Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomi selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi dengan penurunan yang terjadi kinerja keuangan tetap memenuhi kriteria ekonomis. Untuk tingkat efisiensi selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, serta rasio berada di atas 100% sehingga kinerja keuangan dikatakan tidak efisien. Untuk tingkat Efektivitas selama 4 tahun terakhir mengalami penurunan dan hanya tahun 2016 yang mengalami kenaikan. Rasio efektivitas sudah termasuk dalam kategori cukup efektif dimana pemerintah mampu merealisasikan anggaran pendapatan mendekati target yang telah ditetapkan. Pemerintah diharapkan untuk lebih meningkatkan pendapatan melalui pendapatan asli daerah dan sumber daya secara maksimal.
- e. Sugiharti, R. dan Jumaroh (2021). Dalam penelitiannya yang berjudul: "Efektifitas Dan Efisiensi Realisasi

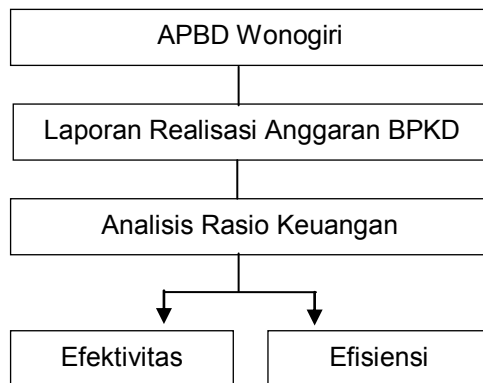
Anggaran Belanja: studi kasus di BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Hasil analisis dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pada periode 2014 -2020 menunjukkan nilai yang bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan terendah terjadi pada 2016. Menerapkan Perencanaan Pengeluaran untuk 2014-2020 dapat dikategorikan efektif karena program yang dilaksanakan telah direalisasikan. Menerapkan anggaran 2014-2020, dalam hal efisiensi, diklasifikasikan sebagai sangat efisien. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung dianggap telah melakukan manajemen anggaran dengan sangat baik di mana pengelolaan anggaran di Bappeda Kabupaten Temanggung berada di bawah konsep efektivitas dan efisiensi.

- f. Hasanah dan Merri (2019). Judul penelitian: "Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017" Hasil analisis efektivitas pengeluaran pemerintah menunjukkan bahwa perhitungan efektivitas perumusan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada tahun 2008 hingga 2017 berfluktuasi dengan tingkat efektivitas rata-rata 93%. Ini berarti bahwa tingkat keefektifan pengeluaran Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu sudah efektif, ini diindikasikan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90%.

#### ➤ **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang APBD Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, dibutuhkan penanganan dan mekanisme yang efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dalam pelaksanaan belanja tersebut, pemerintah diwajibkan untuk

mengelola anggaran berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran

➤ **Hipotesis**

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya (Wardiansyah, 2018: 10). Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019- 2021 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sudah efektif dan efisien”

**METODE PENELITIAN**

**A. Ruang lingkup penelitian**

Objek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin

mengetahui seberapa efisien dan efektifkah pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

**B. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri dengan variabel-variabel yang diteliti adalah:

- RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- APBD (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

**C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi Operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dan pengukurannya, sebagai berikut :

- a. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. Realisasi APBD adalah anggaran keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang telah terealisasi.

**D. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Menurut sugiyono (2017: 90) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah data

laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2017: 81) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu penulis mengambil sampel rencana dan realisasi APBD selama tiga tahun terakhir (2019 - 2021).

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa Dokumentasi, dimana dapat diperoleh melalui dokumen atau data berupa struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri, Visi dan Misi, Fungsi dan Tugas, dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2021.

**F. Metode Analisis Data**

**a. Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah**

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan. Maka semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*). Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti kinerja semakin buruk. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang ditetapkan) (Halim, 2014: 180)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 tahun 1996, kriteria anggaran belanja sebagai berikut :

- > 100% Sangat Efektif
- 90% - 100% Efektif
- 80% - 90% Cukup Efektif
- 60% - 80% Kurang Efektif
- < 60% Tidak Efektif

**b. Analisis Efisien Belanja**

Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien nya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019:152). Efisien Belanja diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- > 100% Tidak Efisien
- 90% - 100% Kurang Efisien
- 80% - 90% Cukup Efisien
- 60% - 80% Efisien
- < 60% Sangat Efisien2.

**GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

**A. Sejarah Kabupaten Wonogiri**

Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Asal kata Wonogiri sendiri berasal dari bahasa Jawa *wana* (alas/hutan/sawah) dan *giri* (gunung/ pegunungan). Nama ini sangat tepat



menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung.

#### B. Letak Geografis

Dari segi geografis, Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 Hektar atau 5,59% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak antara 7032' dan 8015' Lintang Selatan (LS) dan antara 110041' dan 111018' Bujur Timur (BT) dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan Samudra Indonesia.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara administrasi, Kabupaten Wonogiri terbagi atas 25 Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan, dengan lebih 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Wonogiri. Sebagian besar topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 300, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam saling berbeda.

#### C. Kondisi Demografi

##### 1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Wonogiri

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebanyak 1.095.829 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 548.500 orang dan penduduk perempuan sebanyak 547.329 orang. Penduduk terbanyak di Kecamatan Wonogiri sebanyak 87.560 orang atau sebesar 7,99% dari total penduduk dan yang paling sedikit di Kecamatan Paranggupito

sebanyak 18.895 orang atau 1,75% dari total jumlah penduduk. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 358.300 KK sehingga secara rata-rata jumlah jiwa dalam 1 (satu) KK sebanyak 3-4 jiwa.

##### 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tamatan Pendidikan

Jumlah penduduk dari aspek kualitas tingkat pendidikan, selama periode 2019-2020 menunjukkan terjadinya perubahan. Penduduk usia di atas 10 tahun yang tidak/ belum pernah sekolah dan tidak/ belum tamat SD mengalami kenaikan dari 336.119 orang pada tahun 2019 menjadi 338.771 orang pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,78% yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang sekolah. Disisi lain penduduk usia diatas 10 tahun yang memiliki ijazah tertinggi SD/ MI/ sederajat, SMP/ MTs/ sederajat, SLTA/ sederajat, mengalami kenaikan dari 717.310 orang di tahun 2019 menjadi 723.762 orang pada tahun 2020 atau meningkat sebesar 0,75%, sedangkan yang tamat D1/D2, D3, S1 S2 dan S3 juga mengalami peningkatan dari 31.965 orang di tahun 2019 menjadi 33.296 orang atau meningkat 4,00%.

##### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk berdasarkan mata pencaharian dari total jumlah penduduk sebagian besar sebagai petani yaitu sebanyak 26,25% dan sebanyak 22,45% bekerja pada bidang lain diantaranya meliputi jasa-jasa (tukang cukur, tukang batu, tukang jahit, penata rambut, tukang kayu dan lain-lain), buruh harian.

#### D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

##### 1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

2. Visi, Misi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
3. Personalia
4. Struktur Organisasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

**Tabel V.1**  
**Ringkasan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri T.A 2019-2021**

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
<b>Pendapatan</b>	<b>2.456.434.046.373</b>	<b>2.264.560.605.422</b>	<b>2.283.713.003.491</b>
Pendapatan Asli Daerah	261.603.471.132	230.501.783.422	209.572.712.714
Pendapatan Transfer	2.097.489.484.132	1.920.903.522.000	1.937.389.462.121
Lain-lain Pendapatan Yang sah.	97.341.091.109	113.155.300.000	136.750.828.656
<b>BELANJA</b>	<b>2.695.105.999.258</b>	<b>2.489.028.731.561</b>	<b>2.515.543.766.981</b>
Belanja Operasi	1.700.884.593.764	1.765.876.769.364	1.728.196.526.221
Belanja Modal	593.770.780.531	306.770.774.839	392.831.728.955
Belanja Tidak Terduga	27.041.451.942	56.062.995.358	27.155.263.305
Transfer	373.409.173.021	360.318.192.000	367.360.248.500
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>238.671.952.885</b>	<b>224.468.126.139</b>	<b>231.830.763.490</b>
Penerimaan Pemb.	241.671.952.885	226.968.126.139	235.330.763.490
Pengeluaran Pemb.	3.000.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

**Tabel V.2**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri T.A 2019-2021**

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
<b>Pendapatan</b>	<b>2.442.677.972.827</b>	<b>2.273.628.538.635</b>	<b>2.303.564.898.936</b>
Pendapatan Asli Daerah	287.221.631.013	274.293.129.950	241.300.072.882
Pendapatan Transfer	2.059.223.146.004	1.886.896.008.685	1.926.977.290.504
Lain-lain Pendapatan Yang sah.	96.233.195.810	112.439.400.000	135.287.535.550
<b>BELANJA</b>	<b>2.455.975.320.119</b>	<b>2.262.762.452.301</b>	<b>2.297.510.694.153</b>
Belanja Operasi	1.517.429.769.717	1.569.472.774.660	1.542.891.672.219
Belanja Modal	565.091.976.631	291.314.088.408	364.807.421.927
Belanja Tidak Terduga	174.972.000	41.834.794.733	22.901.567.507
Transfer	373.278.601.771	360.140.794.500	366.910.032.500
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>240.265.472.885</b>	<b>224.464.677.156</b>	<b>231.830.763.490</b>
Penerimaan Pemb.	243.265.472.885	226.964.677.156	235.330.763.490
Pengeluaran Pemb.	3.000.000.000	2.500.000.000	3.500.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

## B. Perhitungan dan Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 1. Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Semakin rasio efektivitas berarti kinerja akan semakin baik dan semakin rendah rasio efektivitas berarti kinerja semakin buruk. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan PAD dengan target penerimaan PAD (yang ditetapkan). Diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327 tahun 1996, kriteria anggaran belanja sebagai berikut:

- > 100% Sangat Efektif
- 90% - 100% Efektif
- 80% - 90% Cukup Efektif
- 60% - 80% Kurang Efektif
- < 60% Tidak Efektif

## 2. Efisiensi Belanja Daerah

Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kemendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- > 100% Tidak Efisien
- 90% - 100% Kurang Efisien
- 80% - 90% Cukup Efisien
- 60% - 80% Efisien
- < 60% Sangat Efisien

**Tabel V.3**  
**Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019**

Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan	2.456.434.046.373	2.442.677.972.827	-13.756.073.546	99,44
Pendapatan Asli Daerah	261.603.471.132	287.221.631.013	25.618.159.881	109,79
Pendapatan Transfer	2.097.489.484.132	2.059.223.146.004	-38.266.338.128	98,18
Lain-lain Pendapatan Yang sah.	97.341.091.109	96.233.195.810	-1.107.895.299	98,86
<b>BELANJA</b>	<b>2.695.105.999.258</b>	<b>2.455.975.320.119</b>	<b>-</b>	<b>91,13</b>
Belanja Operasi	1.700.884.593.764	1.517.429.769.717	183.454.824.047	89,21
Belanja Modal	593.770.780.531	565.091.976.631	-28.678.803.900	95,17
Belanja Tidak Terduga	27.041.451.942	174.972.000	-26.866.479.942	0,65
Transfer	373.409.173.021	373.278.601.771	-130.571.250	99,97

PEMBIAYAAN	238.671.952.885	240.265.472.885	1.593.520.000	100,67
Penerimaan Pemb.	241.671.952.885	243.265.472.885	1.593.520.000	100,66
Pengeluaran Pemb.	3.000.000.000	3.000.000.000	0	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

### a. Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{2.442.677.972.827}{2.456.434.046.373} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 99,44\% \text{ (Efektif)}$$

Dari perhitungan rasio efektivitas pendapatan di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 99,44% yang berarti untuk tahun 2019 dikatakan efektif.

### b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{2.455.975.320.119}{2.695.105.999.258} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 91,13 %

$$2) \text{ Belanja Operasi} = \frac{1.517.429.769.717}{1.700.884.593.764} \times 100\%$$

Belanja Operasi = 89,21%

$$3) \text{ Belanja Modal} = \frac{565.091.976.631}{593.770.780.531} \times 100\%$$

Belanja Modal = 95,17%

$$4) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{174.972.000}{27.041.451.942} \times 100\%$$

Belanja Tak Terduga = 0,65%

$$5) \text{ Transfer} = \frac{373.278.601.771}{373.409.173.021} \times 100\%$$

Transfer = 99,97%

Berdasarkan pada perhitungan rasio efisien belanja di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar

89,71% yang berarti untuk tahun anggaran 2019 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 89,21%; 95,17%; 0,65% dan 99,97%%

Defisit Rp. 13.297.347.292

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama periode pelaporan. Pada laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 terdapat Defisit sebesar Rp. 13.297.347.292 dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan Daerah	2.456.434.046.373
Jumlah Belanja Daerah	2.442.677.972.827
Jumlah Belanja Daerah	2.695.105.999.258
Jumlah Belanja Daerah	2.455.975.320.119
Surplus/Defisit	-238.671.952.885
Surplus/Defisit	-13.297.347.292

c. Pembiayaan.

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut perhitungan rasio efisien pembiayaan

$$\text{Realisasi Pembiayaan} \\ \text{Pembiayaan} = \frac{\text{Realisasi Pembiayaan}}{\text{Rencana Pembiayaan}} \times 100\%$$

1) Penerimaan Pembiayaan

$$\text{Penerimaan} = \frac{243.265.472.885}{241.671.952.885} \times 100\% \\ \text{Penerimaan Pembiayaan} = 100,66\%$$

2) Pengeluaran Pembiayaan

$$\text{Pengeluaran} = \frac{3.000.000.000}{3.000.000.000} \times 100\%$$

3.000.000.000

Pengeluaran Pembiayaan = 100%  
Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan masing-masing rasio sebesar 100,66% dan 100%.

Pembiayaan Netto Rp. 240.265.472.885  
Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Laporan realisasi Anggaran Pembiayaan Netto pada tahun 2019 sebesar Rp. 240.265.472.885 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan	241.671.952.885	243.265.472.885
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	3.000.000.000
Pembiayaan Netto	238.671.952.885	240.265.472.885
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.	226.509.399.339	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Pada tahun 2019 laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 226.509.399.339 dengan penjelasan sebagai berikut:		
Defisit	Rp. 13.297.347.292	
Pembiayaan Netto	Rp. 240.265.472.885	

SILPA Rp. 226.509.399.339

**Tabel V.4**  
**Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan	2.264.560.605.422	2.273.628.538.635	9.067.933.213	100,40
Pendapatan Asli Daerah	230.501.783.422	274.293.129.950	43.791.346.528	119,00
Pendapatan Transfer	1.920.903.522.000	1.886.896.008.685	-34.007.513.315	98,23
Lain-lain Pendapatan Yang sah.	113.155.300.000	112.439.400.000	-715.900.000	99,37
<b>BELANJA</b>	<b>2.489.028.731.561</b>	<b>2.262.762.452.301</b>	<b>-226.266.279.260</b>	<b>90,91</b>
Belanja Operasi	1.765.876.769.364	1.569.472.774.660	-196.403.994.704	88,88
Belanja Modal	306.770.774.839	291.314.088.408	-15.456.686.431	94,96

Belanja Tidak Terduga	56.062.995.358	41.834.794.733	-14.228.200.625	74,62
Transfer	360.318.192.000	360.140.794.500	-177.397.500	99,95
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>224.468.126.139</b>	<b>224.464.677.156</b>	<b>-3.448.983</b>	<b>00,00</b>
Penerimaan Pemb.	226.968.126.139	226.964.677.156	-3.448.983	99,998
Pengeluaran Pemb.	2.500.000.000	2.500.000.000	0	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

a. Efektif Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan PAD  
Rasio Efektif =  $\frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{2.273.678.538.635}{2.264.560.605.422} \times 100\%$$

Rasio Efektif = 100,40 %

Dari perhitungan rasio efektivitas pendapatan di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 100,40% yang berarti untuk tahun 2020 dikatakan sangat efektif.

b. Efisien Belanja Daerah

Realisasi Belanja  
Rasio Efisien Belanja =  $\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{2.262.762.452.301}{2.489.028.731.561} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 90,91%

$$1) \text{ Belanja Operasi} = \frac{1.569.522.774.660}{1.765.876.769.364} \times 100\%$$

Belanja Operasi = 88,88%

$$2) \text{ Belanja Modal} = \frac{291.314.088.408}{306.770.774.839} \times 100\%$$

Belanja Modal = 94,96%

$$3) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{41.834.794.733}{56.062.995.358} \times 100\%$$

Belanja Tak Terduga = 74,62%

$$4) \text{ Transfer} = \frac{360.140.794.500}{360.318.192.000} \times 100\%$$

Transfer = 99,95%

Berdasarkan pada perhitungan rasio efisien belanja di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 90,91% yang berarti untuk tahun anggaran 2020 dikatakan kurang efisien. Adapun belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 88,88%; 94,96%; 74,62 dan 99,95%

Surplus Rp. 10.866.086.334  
Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama periode pelaporan. Pada laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 terdapat Surplus sebesar Rp. 10.866.086.334 dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan Daerah	2.264.560.605.422	2.273.628.538.635
Jumlah Belanja Daerah	2.489.028.731.561	2.262.762.452.301
Surplus/Defisit	-224.468.126.139	10.866.086.334

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut perhitungan rasio efisien pembiayaan

Realisasi Pembiayaan  
Pembiayaan =  $\frac{\text{Realisasi Pembiayaan}}{\text{Rencana Pembiayaan}} \times 100\%$

$$1) \text{ Penerimaan Pembiayaan} = \frac{226.964.677.156}{226.968.126.139} \times 100\%$$

Penerimaan Pembiayaan = 99,99%

2) Pengeluaran Pembiayaan  

$$\frac{2.500.000.000}{2.500.000.000} \times 100\%$$
 Pengeluaran Pembiayaan = 100%  
 Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan masing-masing rasio sebesar 99,99% dan 100%.

Pembiayaan Netto Rp. 224.464.677.156  
 Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Laporan realisasi Anggaran Pembiayaan Neto pada tahun 2019 sebesar Rp. 224.464.677.156 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan	226.968.126.139
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000
Pembiayaan Netto	224.468.126.139

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 235.330.763.490

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Pada tahun 2020 laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 235.330.763.490 dengan penjelasan sebagai berikut:

Surplus	Rp. 10.866.086.334
Pembiayaan Netto	Rp. 224.464.677.156
Silpa	Rp. 235.330.763.490

**Tabel V.5**  
**Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

Uraian	Jumlah (Rp)		Selisih	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
Pendapatan	2.283.713.003.491	2.303.564.898.936	19.851.895.445	100,87

Pendapatan Asli Daerah	209.572.712.714	241.300.072.882	31.727.360.168	115,14
Pendapatan Transfer	1.937.389.462.121	1.926.977.290.504	-10.412.171.617	99,46
Lain-lain Pendapatan Yang sah.	136.750.828.656	135.287.535.550	-1.463.293.106	98,93
<b>BELANJA</b>	<b>2.515.543.766.981</b>	<b>2.297.510.694.153</b>	<b>-218.033.072.828</b>	<b>91,33</b>
Belanja Operasi	1.728.196.526.221	1.542.891.672.219	-185.304.854.002	89,28
Belanja Modal	392.831.728.955	364.807.421.927	-28.024.307.028	92,87
Belanja Tidak Terduga	27.155.263.305	22.901.567.507	-4.253.695.798	84,34
Transfer	367.360.248.500	366.910.032.500	-450.216.000	99,88
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>231.830.763.490</b>	<b>231.830.763.490</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
Penerimaan Pemb.	235.330.763.490	235.330.763.490	0	100,00
Pengeluaran Pemb.	3.500.000.000	3.500.000.000	0	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

a. Efektif Pendapatan Daerah  

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{2.303.564.898.937}{2.283.713.003.491} \times 100\%$$

Rasio Efektif = 100,87 %  
 Dari perhitungan rasio efektivitas pendapatan di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran lebih besar dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efektif anggaran yang dicapai sebesar 100,87 yang berarti untuk tahun 2021 dikatakan sangat efektif.

b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{1.930.600.661.653}{2.148.183.518.481} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi = 89,87 %

$$1) \text{ Belanja Operasi} = \frac{1.542.891.672.219}{1.728.196.526.221} \times 100\%$$

Belanja Operasi = 89,28 %

$$2) \text{ Belanja Modal} = \frac{364.807.421.927}{392.831.728.955} \times 100\%$$

Belanja Modal = 92,87 %

$$3) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{22.901.567.507}{27.155.263.305} \times 100\%$$

Belanja Tak Terduga = 84,34 %

$$4) \text{ Transfer} = \frac{366.910.032.500}{367.360.248.500} \times 100\%$$

Transfer = 99,88 %

Berdasarkan pada perhitungan rasio efisien belanja di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah lebih kecil dibandingkan target anggaran yang ditetapkan sehingga tingkat efisien anggaran belanja yang dicapai sebesar 89,87 % yang berarti untuk tahun anggaran 2021 dikatakan cukup efisien. Adapun belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah dituangkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dengan masing-masing tingkat rasio efisien sebesar 89,28%; 92,87%; 84,34%; dan 99,88%

Surplus Rp. 6.054.204.783

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan dan Belanja selama periode pelaporan. Pada laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 terdapat Surplus sebesar Rp. 6.054.204.783 dengan penjelasan sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan Daerah	2.283.713.003.491	2.303.564.898.936
Jumlah Belanja Daerah	2.515.543.766.981	2.297.510.694.153
Surplus/Defisit	-231.830.763.490	6.054.204.7834.

#### c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut perhitungan rasio efisien pembiayaan

$$\text{Pembiayaan} = \frac{\text{Realisasi Pembiayaan}}{\text{Rencana Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Penerimaan Pembiayaan} = \frac{235.330.763.490}{235.330.763.490} \times 100\%$$

Penerimaan Pembiayaan = 100%

$$2) \text{ Pengeluaran Pembiayaan} = \frac{3.500.000.000}{3.500.000.000} \times 100\%$$

Pengeluaran Pembiayaan = 100,00%

Pembiayaan terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan masing-masing rasio sebesar 100% dan 100,00%

Pembiayaan Netto Rp. 231.830.763.490 Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Laporan realisasi Anggaran Pembiayaan Netto pada tahun 2021 sebesar Rp. 231.830.763.490 dengan penjelasan sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan	235.330.763.490	235.330.763.490
Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	3.500.000.000
Pembiayaan Netto	231.830.763.490	231.830.763.490
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 237.884.968.273	

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu. Pada tahun 2017 laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.

237.884.968.273 dengan penjelasan sebagai berikut:  
 Surplus Rp. 6.054.204.783  
 Pembiayaan Neto Rp. 231.830.763.490  
 SILPA Rp. 237.884.968.273

**Tabel V.6**  
**Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri T.A 2019-2021**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Analisis Efektivitas
2019	2.456.434.046.373	2.442.677.972.827	99,44	Efektif
2020	2.264.560.605.422	2.273.628.538.635	100,40	Sangat Efektif
2021	2.283.713.003.491	2.303.564.898.936	100,87	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah Penulis (2023)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio efektif pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 belum mencapai target namun sudah dalam kategori efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan. Hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan lebih kecil daripada target anggaran pendapatan yang ditetapkan dengan masing-masing rasio sebesar 99,44%; 100,40; dan 100,87%.

**Tabel V.7**  
**Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri T.A 2019-2021**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase	Analisis Efisiensi
2019	2.695.105.999.258	2.455.975.320.119	91,13 %	Kurang Efisien
2020	2.489.028.731.561	2.262.762.452.301	90,91 %	Kurang Efisien
2021	2.515.543.766.981	2.297.510.694.153	91,33 %	Kurang Efisien

Sumber: Data sekunder diolah Penulis (2022)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 tidak melebihi dalam merealisasikan anggaran belanja. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja daerah lebih kecil daripada target anggaran penerimaan yang ditetapkan dengan masing-masing rasio sebesar 91,13 %; 90,91; dan 91,33 %.

### C. Pembahasan Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran adalah suatu pekerjaan pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan Negara dan masa depan dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan diterima dalam masa tersebut (Mardiasmo, 2018:98). Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Halim dan Kusufi 2016:48).

#### 1. Rasio Efektifitas

Anggaran Pendapatan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019-2021 berdasarkan hasil penelitian rasio efektif pengelolaan anggaran pendapatan yaitu dengan masing-masing persentase sebesar 99,4%; 100,40%; dan 100,87%. Tingkat efektif anggaran pendapatan yang paling tinggi yaitu pada tahun 2021 dengan presentasi 100,87%. Dengan demikian rasio keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk tahun anggaran 2019-2021 dikatakan efektif.

#### 2. Rasio Efisiensi

Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan



Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019-2021 berdasarkan hasil penelitian rasio efisien berada pada presentasi masing-masing sebesar 91,13%; 90,91%; dan 91,33% dengan penggunaan anggaran masing-masing sebesar Rp. 2.455.975.320.119; Rp. 2.262.762.452.301; dan Rp. 2.297.510.694.153, dari total realisasi anggaran belanja pada tahun 2019-2021 dikatakan kurang efisien karena berada pada tingkat predikat 90% - 100% dalam penggunaan anggaran dikatakan kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja. Kurang efisiennya anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri disebabkan Karena terjadinya perubahan anggaran dan defisit anggaran serta realisasi anggaran belanja menghampiri jumlah target anggaran belanja dan realisasi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Belum mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja baik dalam penggunaan, pengendalian serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran sehingga tercapai target efisiensi belanja. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Rusdi (2018). Dalam penelitian Rusdi bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi belanja menggunakan analisis varians belanja sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi belanja menggunakan angka rasio efisiensi belanja. Rusdi dalam penelitian menunjukkan tingkat efisiensi belanja menggunakan analisis varians belanja mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi belanja menggunakan rasio efisiensi belanja dikatakan kurang efisien

dalam melakukan penghematan anggaran belanja.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pendapatan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019-2021 sudah mencapai target anggaran yang telah ditetapkan namun telah memenuhi kriteria efektif karena berada pada predikat di atas 90%-100% dengan masing-masing presentasi rasio efektif yaitu sebesar 99,4%; 100,40%; dan 100,87%.
2. Tingkat efisiensi belanja daerah pada badan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2021 dinilai kurang efisien dengan presentasi sebesar 91,13%; 90,91%; dan 91,33% karena belum berhasil mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang minimal dan berada pada predikat 90%-100% dalam penggunaan anggaran dikatakan kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja.

### **B. Saran**

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri diharapkan untuk dapat mengelola pendapatan dari sektor pajak, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk anggaran belanja yang masih kurang efisien, hendaknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam penggunaan anggaran belanja

daerah disarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja baik dalam penggunaan, pengendalian serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran sehingga tercapai target efisiensi belanja.d) Adanya jaminan pekerjaan. Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karier yang jelas dalam melakukan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, (2015). Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Teras.
- Bastian, Indra. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Beni Peksi. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Danumihardja, M., (2014). Manajemen Keuangan Sekolah. Jakarta: UHAMKA Press.
- Hasanah, M. dan Merri A., (2019). Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi dan Efektivitas). *Convergence : The Journal Of Economic Development*. Vol. 1(1) : 1-12.
- Halim A, dan Muhammad S.K., (2014). Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jilid 2. Jakarta Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). Buku Akuntansi Sektor Publik. Penerbit UII Press Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016b). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Penerbit STIM YPKN.
- Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit STIM YPKN.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manimbaga, F. Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA* Vol.9 No, Hal. 982-992.
- Mardiasmo, (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Prasetyo, W.H. Agustina P. dan Nugrahen (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 11 No : 1
- Richard M. Steers, (2015). Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga.
- Salbiah dan Rizky, R., 2012. Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, Vol 15, N Hal. 42-52.
- Sedarmayanti, (2015). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sugiharti, R. dan Jumaroh (2021). Efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja: studi kasus di BAPPEDA Kabupaten Temanggung. *Journal of Economics Research and Policy Studies*. Vol. 1 No. 1.
- Sunanto (2017). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal MONEX*, Vol.6 No 1.
- Syahputra, A.A dan Mujibur R (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Ekonomi Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Vol. 3 No.1, pp 46-58.
- Rusdi. (2018). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Tesis S2, Makasar: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Enrekang Makassar
- Wardiansyah, D., (2018) Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta.
- Widyastuti, N., 2015. Pengaruh Stres Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja SKPD Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, Vol. IV, No. 2, Juni 2015, hal. 15 – 27.
- Winarno, Budi, (2016) Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.